

# MENJAGA BENTENG KEBINEKHAAN DI SEKOLAH



Studi Kebijakan OSIS  
di Kota Padang, Kab. Cirebon,  
Kab. Sukabumi, Kota Surakarta,  
Kota Denpasar, dan Kota Tomohon

**MAARIF** *Institute*  
for Culture and Humanity



MENJAGA  
BENTENG  
KEBINEKAAAN  
DI SEKOLAH

*Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang,  
Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi,  
Kota Surakarta, Kota Denpasar,  
dan Kota Tomohon.*

**MENJAGA BENTENG KEBINEKAAN DI SEKOLAH: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon.**

374 halaman, xiv, 175 x 250 mm

**Cetakan I, Januari 2018**

**Pembaca Ahli:** Donni Koesoema A, M. Alie Humaedi, Muhd. Abdullah Darraz

**Konsultan Ahli:** Zuli Qodir

**Tim Penulis:** Abdul Azis Muslim, Anis F. Fuadah, Benni Setiawan, M. Hafidz Ghazali, Nikmatullah Syarif, Saefudin Zuhri

**Kontributor:** Armi Tubagus, Hadiansyah Yudistira, Jajuli, Koidah

**Editor:** Khelmy K. Pribadi, Pipit Aidul Fitriyana

**Tata Letak:** Harhar Muharam

**Cover:** Zulkarnaen

**Disusun dan diterbitkan oleh:**

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp. : 021-83794554

Email : [maarif@maarifinstitute.org](mailto:maarif@maarifinstitute.org)

Website : [www.maarifinstitute.org](http://www.maarifinstitute.org)

**Dengan dukungan:**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta & United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

Diterbitkan sebagai bagian Program CONVEY. Sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi serta melawan adanya kecenderungan ekstremisme yang bernuansa kekerasan, mencegah penyebaran sikap ekstrem dan perilaku kekerasan, serta radikalisme di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, serta memperkuat keterlibatan siswa dan guru dalam melawan penyebaran sikap ekstrem, perilaku kekerasan dan radikalisme.

**ISBN : 978-602-61010-1-3**

# MENJAGA “BENTENG” KEINDONESIAAN DI SEKOLAH

## *Pengantar Direktur Eksekutif MAARIF Institute*

Radikalisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menasar kalangan generasi muda. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi fenomena ini. Riset MAARIF Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah secara massif melakukan penetrasi pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan. Riset MAARIF Institute misalnya memetakan adanya 3 pintu masuk utama, bagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan penetrasi di lingkungan institusi sekolah setingkat SMA. Kegiatan ekstrakurikuler, peran guru dalam proses belajar-mengajar, dan melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.

Alih-alih melakukan pembendungan penetrasi radikalisme, seringkali kebijakan sekolah malah terkesan permisif terhadap infiltrasi radikalisme di sekolah. Indikasinya terlihat pada mudahnya pihak sekolah melibatkan aktor-aktor kelompok radikal dalam proses kegiatan di sekolah. Pada umumnya mereka seringkali dilibatkan sebagai mentor dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang berbasis pada aktivitas keagamaan.

Dalam tesis yang dikembangkan oleh kami, kebijakan sekolah, terutama kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu aspek penting, bahkan ia merupakan sisi terpenting bagaimana komunitas sekolah dapat menghadang arus radikalisme yang masuk ke sekolah. Bukan saja bisa diarahkan untuk melakukan “perlawanan” terhadap gelombang radikalisme, lebih jauh, kebijakan sekolah semestinya bisa menjadi pintu utama untuk mengembangkan kehidupan sekolah yang memiliki perspektif kebinekaan, demokratis, dan toleran.

Sepanjang tahun 2017, MAARIF Institute telah melakukan pemetaan dalam bentuk penelitian kualitatif terkait sejauh mana kebijakan internal sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler mampu menjadi “benteng” bagi berbagai serangan radikalisasi dan propaganda anti-kebinekaan dan intoleransi di sekolah. Penelitian ini dilakukan di 11 kota/kabupaten, yakni di Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kab. Lebak, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Makassar, dan Kota Tomohon.

Buku ini merekamkan hasil penelitian di enam kota terakhir (Kota Padang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon) yang dilakukan pada medio September-November 2017 dengan melibatkan lebih dari 450 orang *stakeholder* kunci di tingkat lokal, terutama di lingkungan sekolah, baik Sekolah Menengah Atas maupun Madrasah Aliyah.

Ada banyak temuan penting yang bisa dijadikan perhatian utama, baik itu sebagai bagian dari praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam upaya memperkuat kehidupan kebinekaan di sekolah, sekaligus membentengi sekolah dari penetrasi kelompok radikal, maupun berbagai fenomena memprihatinkan yang menggambarkan bagaimana kebijakan internal sekolah sangat lemah dalam menghadang penetrasi radikalisme.

Dalam hal yang terakhir, riset ini menemukan satu fenomena umum di internal sekolah, yakni masih rendahnya inisiasi pemangku kebijakan sekolah dalam merumuskan kebijakan khusus dalam upaya menghadang radikalisme di sekolah. Di beberapa sekolah, tentu sudah ada upaya yang mengarah kepada hal tersebut, namun upaya tersebut jauh tidak berimbang dengan massifnya gerakan radikal yang masuk ke sekolah.

Rendahny sikap kritis dan kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan di sekolah, terutama kepala sekolah terkait peta gerakan radikalisme di luar sekolah, juga telah membuat komunitas sekolah semakin rentan terhadap infiltrasi gerakan radikal yang datang dari luar sekolah. Pihak sekolah kerap tidak menyadari dalam beberapa agenda internal yang mereka lakukan, mereka seringkali mengundang narasumber yang memiliki pandangan radikal yang tidak sesuai dengan visi pendidikan di sekolah, diantaranya dilakukan dalam program pengajian bulanan di sekolah.

Dalam riset ini kami juga menemukan beberapa praktik terbaik, meskipun awalnya ini berasal dari kelompok masyarakat sipil di luar sekolah.

Di Kabupaten Cirebon misalnya, kelompok masyarakat sipil keagamaan moderat yang berasal dari pesantren merasa memiliki tanggungjawab moral untuk terlibat dalam upaya memperkuat kehidupan kebinekaan dan demokrasi di sekolah-sekolah umum negeri. Mereka aktif melakukan pendampingan dan mendeklarasikan organisasi pelajar moderat untuk menandingi jaringan kelompok radikal yang ada di sekolah.

Di daerah lain di Kabupaten Cirebon, ditemukan adanya upaya memperkuat ikatan kebinekaan dengan melakukan kegiatan kunjungan ke komunitas yang berbeda. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berupaya memperkenalkan siswa tentang realitas kebinekaan secara nyata. Secara terjadwal, sekolah menugaskan siswa untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain dan mengenalnya secara langsung. Menurutnya, kunjungan ke sejumlah tempat ibadah agama lain merupakan satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan kebinekaan.

Hal terbaik lain yang perlu dicatat disini adalah adanya kegiatan karnaval kebinekaan yang diinisiasi oleh pengurus OSIS di sebuah SMAN di Kab. Cirebon. Upaya ini dilakukan untuk menyemai kehidupan kebinekaan di sekolah. Karnaval ini berupa keharusan untuk menggunakan pakaian pahlawan nasional dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya yang majemuk di Indonesia. Dengan demikian, siswa mengerti bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh satu agama dan suku tertentu, tapi oleh semua warga dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda.

Beberapa temuan terakhir ini bagi kami telah memberikan sinyal optimisme tentang upaya memperkuat imunitas komunitas sekolah dalam melawan berbagai ideologi radikal yang masuk ke lingkungan institusi pendidikan.

Buku ini merekam banyak temuan dari hasil riset yang kami lakukan selama periode September-November 2017 lalu. Kami berharap catatan-catatan penting yang terkandung di dalam buku ini dapat memberikan peta kebijakan internal sekolah, terutama terkait dengan kebijakan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengokohkan kehidupan kebinekaan yang lahir dari dunia sekolah. Bagi kami, kegiatan ekstrakurikuler seharusnya bisa menjadi semacam “benteng” yang di satu sisi dapat memfilter berbagai paham radikal agar tidak masuk merangsek dalam kehidupan sekolah, sekaligus juga diharapkan bisa menjadi taman bagi tumbuh-kembangnya keragaman di sekolah.

Untuk itu, atas nama MAARIF Institute saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada *Project Management Unit (PMU) CONVEY* Indonesia yang dikelola oleh Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UNDP, yang telah memungkinkan program penelitian ini bisa terlaksana dengan menghasilkan output sesuai dengan target. Terimakasih juga kami sampaikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penelitian ini, terutama telah memberikan rekomendasi sehingga memudahkan tim peneliti untuk mengambil data (melakukan wawancara dan FGD) di kalangan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.

Tentu terimakasih juga saya sampaikan kepada tim peneliti sekaligus kontributor dari buku ini, yang telah berjuang melakukan pengambilan data dan menuliskan hasil penelitiannya sehingga menjadi buku yang dapat dibaca khalayak, di antaranya adalah Abdul Aziz Muslim, Anis Fuadah, Benny Setiawan, Hafizh Ghozali, Nikmatullah, dan Saefuddin Zuhri. Penelitian ini sendiri dikoordinir oleh Pipit Aidul Fitriyana. Kepada Tim Pembaca Ahli yang telah banyak memberi masukan penting dan mematangkan konten buku ini, sehingga buku ini dapat dikonsumsi secara luas oleh publik, diantaranya adalah Dr. M. Alie Humaidi, Donni Koesoema A., M.Ed, dan Dr. Zuly Qodir. Terakhir kepada kawan-kawan MAARIF Institute yang telah bekerja keras memuluskan berbagai proses selama program ini berlangsung. Buku ini merupakan salah satu karya gemilang lain yang menjadi bukti atas kerja keras dan keringat yang telah kawan-kawan torehkan.

Akhirnya, saya sampaikan selamat membaca dan menikmati buku ini kepada khalayak publik. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menginspirasi komunitas sekolah di Indonesia dalam upaya memperkuat kebinekaan di lingkungannya masing-masing.

Jakarta, 29 Januari 2018

**Muhammad Abdullah Darraz**

Direktur Eksekutif

# KATA PENGANTAR

Setidaknya sejak satu dasawarsa terakhir ini, Indonesia menyaksikan tumbuhnya paham-paham keagamaan ekstrem bernuansa kekerasan dan radikalisme. Kecenderungan ini ditandai dengan terjadinya sejumlah serangan teroris di berbagai tempat di negeri ini. Konflik kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan berbasis agama dan intoleransi juga terus meningkat. Dengan lebih dari 200 kasus kekerasan berbasis agama setiap tahunnya, isu violent extremism bisa dibilang masih menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Tumbuhnya radikalisme bernuansa agama di dunia pendidikan yang melibatkan generasi muda juga perlu mendapat perhatian khusus. Survei Nasional tentang “Sikap Keberagamaan Gen Z” yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) pada 2017, menunjukkan bahwa pada level opini, siswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran, opini radikal (58,5%), opini intoleransi internal (51,1%), dan opini intoleransi eksternal (34,3%). Dari sisi aksi, siswa memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat/toleran, aksi radikal 7%, dan aksi intoleransi eksternal 17,3%. Namun pada aksi intoleransi internal komunitas Islam, cenderung lebih tinggi, yaitu 34,1%.

Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab yang menyumbangkan tumbuhnya kecenderungan pandangan keagamaan yang intoleran dan radikal di atas ini. Salah satu yang paling langsung adalah tidak adanya dorongan untuk menggunakan perangkat kelembagaan sekolah, khususnya peran OSIS-untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk membendung radikalisme di sekolah. Di samping itu, melalui kekuatan kelembagaan tadi dan program-program kreatif yang diciptakan, sekolah juga belum terdorong untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan tentang OSIS yang boleh jadi sangat efektif menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi di internal sekolah.

Pada 2017, PPIM bekerjasama dengan MAARIF Institute melakukan semacam penelitian assessment dan diteruskan dengan program advokasi kebijakan terkait OSIS. Kerjasama ini sendiri merupakan bagian dari proyek *Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism*



in Indonesia (CONVEY), atas bantuan dana dari United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Proyek ini berupaya menangani masalah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui pendidikan agama. Tujuan kerjasama ini dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang lebih serius untuk memaksimalkan fungsi OSIS agar bisa menjadi aktor kunci penjaga kebinekaan di sekolah.

Untuk tujuan ini, telah dilakukan beberapa aktivitas. Di antaranya ada riset tentang potensi ekstremisme, radikalisasi dan intoleransi di tubuh OSIS; asesmen kebijakan tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan dan memengaruhi program OSIS; mencari praktik-praktik terbaik pengelolaan OSIS di sekolah, serta menyusun policy brief.

Buku sederhana ini bisa dikatakan sebagai upaya merekam hasil penelitian yang dilakukan dan praktik-praktik terbaik pengelolaan OSIS di sekolah. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa, potensi tumbuhnya pandangan-pandangan keagamaan yang intoleran di lingkungan siswa-siswi di sekolah sungguh-sungguh ada. Meski demikian, di beberapa sekolah menunjukkan adanya peran dari kelompok moderat seperti kelompok-kelompok siswa sekolah yang tergabung dalam organisasi civil society semisal NU dan Muhammadiyah terhadap infiltrasi yang dilakukan oleh kelompok radikal.

Mewakili teman-teman yang tergabung dalam Project Management Unit (PMU), Countering Violence Extremism for Youth (CONVEY), kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada MAARIF Institute atas kerjasama yang dilakukan. Selamat membaca dan menikmati. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan menghadirkan inspirasi dalam upaya bersama menghalau ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme di tanah air. Kami percaya bahwa, radikalisme di Indonesia akan benar-benar tidak bisa hidup ketika radikalisme ideologi kekerasan menjadi perhatian semua orang.

Tangerang Selatan, 31 Januari 2018

Ali Munhanif dan Jajang Jahroni  
PMU CONVEY  
PPIM UIN Jakarta-UNDP

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar Direktur Eksekutif MAARIF Institute .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Sekolah Menengah sebagai Arena Radikalisme .....	5
<b>1. Surakarta.....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Lokasi.....	15
1. Profil Sekolah.....	15
a. SMAN 1 dan SMAN 3 Surakarta.....	15
b. SMAN 5 dan SMAN 6 Surakarta.....	17
c. MAN 1 dan MAN 2 Surakarta .....	19
1). Latar Belakang Guru SMAN dan MAN Surakarta .....	21
2). Struktur Ruang Sekolah .....	22
2. Anatomi Organisasi di Sekolah.....	24
a. Mekanisme Suksesi .....	25
b. Struktur OSIS.....	26
c. Kegiatan OSIS .....	29
3. Peta Jejaring.....	30
a. Aktor Internal.....	30
b. Aktor Eksternal .....	32
4. Karakter Masyarakat, Konteks Sosial Budaya.....	34
a. Profil Kota Surakarta.....	34
b. Aktivitas Keagamaan .....	34
c. Kelompok-Kelompok Ormas dan Partai Politik.....	37
d. Karakter Budaya dan Kearifan Lokal .....	37
B. Temuan Hasil.....	38
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan) .....	38
2. Syariat Islam, Khilafah Islamiyah, dan Pancasila (Kuasa Negara yang Terlupakan).....	41
3. Mereka yang rentan di Tengah yang Bertahan (Hubungan Sosial Kegamaan).....	47
a. Kepemimpinan Non-Muslim .....	52
b. Pandangan terhadap Liyan.....	54
4. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	59
5. Internalisasi Nilai Kebhinekaan, Transmisi dan Penerjemahan Nilai .....	63

<b>2. Sukabumi</b> .....	67
A. Gambaran Wilayah Penelitian Kab. Sukabumi.....	67
1. Potensi Geografis.....	67
2. Peta Demografi dan Agama.....	69
3. Sosial Ekonomi dan Pendidikan.....	71
4. Politik dan Pemerintahan.....	74
5. Subjek dan Dinamika Penelitian.....	76
B. Profil Sekolah.....	77
1. SMAN 1 Sukaraja.....	77
2. SMAN 1 Cisaat.....	80
3. SMAN 1 Cikembar.....	83
4. SMAN 1 Jampang Kulon.....	86
5. MAN 1 Sukabumi (Cibadak).....	89
6. MAN 3 Sukabumi (Surade).....	92
C. Temuan Hasil Penelitian.....	95
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas (Fenomena Radikalisme di Kalangan Siswa dan Organisasi Kesiswaan).....	95
a. Pemahaman dan Referensi Keagamaan Siswa.....	107
2. Kuasa Negara yang Terlupakan (Implementasi Permendikbud dan Aturan-aturan).....	108
a. Implementasi Permendikbud No. 39 Tahun 2008.....	109
b. Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015.....	112
c. Implementasi Perda terkait Agama dan Pendidikan.....	114
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan (Daya Tahan dan Strategi Sekolah dalam Menghadapi Isu dan Infiltrasi Gerakan Radikal).....	116
4. Internalisasi Nilai Kebinekaan dan Kebangsaan.....	117
5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-Kasus di Sekolah.....	118
a. Pesantren Sekolah.....	118
b. Ekstrakurikuler dan Sekolah Ramah Anak.....	119
c. Organisasi Kemasyarakatan.....	120
<b>3. Padang</b> .....	123
A. Gambaran Umum Lokasi.....	123
1. Profil Sekolah: OSIS, Rohis dan Jaringannya.....	123
2. Karakter Sosial Budaya Masyarakat.....	130
B. Temuan Hasil Penelitian.....	133
1. Ekstrakurikuler: Dominasi Budaya Mayoritas di Tengah Minoritas Tertindas.....	133
2. OSIS di Simpang Jalan: Ketimpangan Gender, Pencarian Jati diri dan Radikalisme Setengah Hati.....	140
3. Mereka yang Rentan Di Tengah yang Bertahan.....	145
4. Mencari Model Ketahanan di Sekolah.....	150
<b>4. Denpasar</b> .....	152
A. Gambaran Umum Lokasi.....	152
1. Profil Sekolah.....	152
a. Data Murid.....	152
b. Sosial Ekonomi Murid.....	154
c. Data Guru/ Lulusan Alumni Guru.....	154
d. Struktur Ruang Sekolah.....	155

2.	Anatomi atau Struktur Organisasi di Sekolah.....	156
a.	Profil OSIS dan MPK .....	156
b.	Struktur OSIS.....	161
c.	Mekanisme Sukses OSIS .....	162
3.	Peta Jejaring.....	163
a.	Aktor Internal.....	163
b.	Aktor Eksternal .....	164
B.	Konteks Sosial Budaya Bali .....	164
1.	Aktifitas Keagamaan .....	164
2.	Kelompok-kelompok Organisasi Keagamaan (Ormas) dan Partai Politik (Parpol).....	170
3.	Karakter Budaya atau Kearifan Lokal.....	173
C.	Temuan Hasil Penelitian .....	175
1.	Mayoritas vs Minoritas: Eksklusifitas Pengurus OSIS, Dominasi Ritual Ibadah Hindu dan Intoleransi terhadap Minoritas .....	175
a.	OSIS: Eksklusifitas Kepengurusan .....	176
b.	Dominasi Ritual Agama Hindu melalui Bidang Ketakwaan.....	178
c.	Pandangan tentang Terorisme.....	184
d.	Intoleransi Agama .....	186
2.	Kuasa Negara yang Terlupakan.....	199
a.	Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia .....	205
b.	Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara.....	208
c.	Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga sesuai Bakat dan Minat. ....	211
d.	Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural .....	213
e.	Pembinaan Kreatifitas, Keterampilan dan Kewirausahaan.....	214
f.	Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi .....	216
g.	Pembinaan Sastra dan Budaya.....	216
h.	Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	217
i.	Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris.....	217
3.	Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	218
a.	Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai.....	220
b.	Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	221
5.	<b>Cirebon</b> .....	227
A.	Lanskap Penelitian .....	227
1.	Konteks Masyarakat .....	227
2.	Konteks Sekolah .....	229
a.	Latar Sosial Siswa dan Guru.....	232
b.	Tata-ruang Sekolah.....	234
3.	Anatomi OSIS di Sekolah .....	235
4.	Peta Aktor .....	238
B.	Temuan Hasil Penelitian .....	240
1.	Ekskul di Persimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas.....	242
a.	Konteks Radikalisme dan Terorisme di Cirebon.....	242
b.	Radikalisme di Institusi Pendidikan.....	246
c.	Sumber Pengaruh Radikalisme pada Siswa .....	248
d.	Dinamika Baru Radikalisme di Sekolah.....	252

2. Kuasa Negara yang Terlupakan .....	253
a. Watak Kebijakan Ekstra: Berlomba Menjadi Sekolah Islami .....	254
b. Nasib Kelompok Minoritas .....	258
c. Aktor Kebijakan.....	260
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	263
a. Peran Para Aktor .....	263
1). Menghadirkan Organisasi Kepemudaan di Sekolah .....	264
2). Mengenalkan Siswa tentang Fakta Kebinekaan .....	266
b. Memperkuat Keterlibatan Jaringan .....	266
c. Karnaval Kebinekaan.....	267
d. Dinamika Hubungan antar Lembaga .....	268
4. Mencari Model Ketahanan di Tengah Kerawanan.....	270
<b>6. Tomohon .....</b>	<b>272</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi.....</b>	<b>272</b>
1. SMAN 1 Tomohon.....	272
2. SMAN 2 Tomohon.....	274
3. MA Mardhatillah .....	275
4. SMA Lokon St. Nikolaus .....	277
5. SMA Kristen 1.....	279
6. SMA Lentera Harapan.....	281
7. SMA Kosgoro .....	283
<b>B. Temuan Hasil Penelitian .....</b>	<b>285</b>
1. Ekskul di Pesimpangan Jalan: Antara Isu dan Realitas.....	285
2. Kuasa Negara yang Terlupakan.....	288
3. Mereka yang Rentan di Tengah yang Bertahan .....	300
4. Internalisasi Nilai Kebinekaan: Transmisi dan Penerjemahan Nilai.....	303
5. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah.....	305
<b>Sebuah Catatan Penutup: Mencipta Sekolah Penuh Kebinekaan, Menolak Radikalisme Berbaju Pendidikan .....</b>	<b>313</b>
<b>Praktik-praktik Pengelolaan OSIS di Sekolah .....</b>	<b>329</b>
1. Menuju Pesantren Inklusif: Potret Pengelolaan Pesantren Sekolah dalam Rangka Menangkal Radikalisme ( <i>Hadiansyah Yudistira</i> ).....	329
2. Potret Toleransi dari Rohis, IPNU dan IPPNU ( <i>Koidah</i> ).....	336
3. Toleransi di SMAN 1 Sumber Cirebon ( <i>Jajuli</i> ).....	347
4. Sekolah, Agama dan Toleransi ( <i>Armi Tubagus</i> ) .....	352
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>356</b>
<b>Daftar Sekolah Sampel Penelitian .....</b>	<b>362</b>
<b>Wawancara .....</b>	<b>363</b>
<b>Profil Lembaga</b>	
Maarif Institute For Culture And Humanity .....	371
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM-UIN Jakarta) .....	372
Tentang UNDP .....	374

## DAFTAR GAMBAR

### Sukabumi

Gambar 1.	Peta Sukabumi .....	68
Gambar 2.	Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Sukabumi, 2014 (BPS Kabupaten Sukabumi, 2015).....	72
Gambar 3.	Skema Suksesi OSIS Smancik .....	85
Gambar 4.	Peta Aktor .....	99

### Padang

Gambar 5.	Peta Kota Padang.....	131
Gambar 6.	Gerakan Mengaji 30 Juz Malam Tahun Baru 2017 Di depan Masjid Raya Sumatera Barat .....	144

### Denpasar

Gambar 7.	Struktur Organisasi Osis di SMAN 8 Denpasar .....	157
-----------	---	-----

### Cirebon

Gambar 8.	Bagan Produksi Kebudayaan Cirebon yang Melahirkan Hibriditas Kebudayaan .....	228
Gambar 9.	Bagan Anatomi Struktur OSIS .....	237
Gambar 10.	Bagan Geneologi dan Arus Radikalisme di Lembaga Pendidikan .....	248
Gambar 11.	Sumber Pengaruh Radikalisme Pada Siswa di Cirebon.....	251

## DAFTAR TABEL

### Surakarta

Tabel 1.	Grafik passing grade penerimaan siswa baru SMAN di Surakarta tahun 2016 ( <a href="http://www.semarangpos.com/2016/06/14/ppdb-2016-berikut-jurnal-ppdb-online-sma-di-solo-hingga-selasa-siang-728806">http://www.semarangpos.com/2016/06/14/ppdb-2016-berikut-jurnal-ppdb-online-sma-di-solo-hingga-selasa-siang-728806</a> )... ..	18
Tabel 2.	Persentase Umat Islam dan Kristiani .....	35

### Denpasar

Tabel 3.	Jumlah Siswa berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama.....	153
Tabel 4.	Jumlah Pemeluk Agama Kota Denpasar tahun 2009-2013 .....	165
Tabel 5.	Bentuk Eksklusifitas dan Intoleransi di Sekolah .....	196
Tabel 6.	Jenis pelanggaran ada beberapa aspek yakni kerajinan, kedisiplinan, ketertiban, etika, dan moral.....	207
Tabel 7.	Praktik Kebinekaan di Sekolah .....	223

### Cirebon

Tabel 8.	Kategori Sekolah .....	232
Tabel 9.	Ragam Kegiatan Ekstrakurikuler .....	238



# PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2016, gonjang ganjing politik nasional terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan Pilkada Jakarta dan Ahok sebagai aktor utamanya. Aksi I pada September 2016 dan Aksi II pada Oktober 2016 di Balai Kota tidak menyedot perhatian publik secara luas. Tetapi Aksi III dan IV yang dikenal dengan istilah Istilah Aksi Bela Islam I dan II dengan tagline AKSI BELA ISLAM, yang kemudian dikenal luas dengan sebutan Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212, menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik Indonesia bahkan luar negeri. Banyak orang kemudian menyebutnya sebagai gerakan *people power* umat Islam Indonesia, sebab dihadiri oleh kurang lebih 5-7 juta manusia dengan berpakaian putih-putih. Sebagian lagi menyebut sebagai gerakan Islam Populis, istilah Populisme Islam sebagaimana pernah dikemukakan oleh Vedi R Hadiz, ketika membaca gerakan demonstrasi di Timur Tengah dan Indonesia beberapa waktu sebelumnya, sebab melibatkan massa arus bawah yang sebenarnya sebagian besar adalah awam politik.<sup>1</sup> (Vedi R. Hadiz: 2015)

Aksi Bela Islam menjadi besar tentu bukan karena satu penyebab. Terdapat banyak penyebab di sana, baik politik, ekonomi, hukum, kewargaan dan kultural. Inilah yang kemudian memunculkan banyak aktor dan peristiwa diantara satu dengan lainnya saling berkelit berkelindan. Tidak ada yang tunggal di sana. Secara nasional dan lokal kondisi politik kita terus berubah dan tensinya sangat tinggi, terutama menjelang Pilkada serentak di Indonesia. Kita melihat misalnya, sebagian dari peserta aksi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih terbilang lemah dalam hal penegakan hukum dan ekonomi rakyat. Oleh karenanya, dalam Aksi di Jakarta, dua isu ini menjadi perhatian para peserta aksi ketika orasi, terutama

---

1 Vedi R Hadiz, *Populisme Islam in Indonesia and the Middle East*, (Singapore: ISEAS, 2015).



pada Aksi Damai pertama pada 4 November 2016, yang luas dikenal dengan Aksi 411.

Besarnya Aksi Bela Islam dikaitkan dengan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi selain adanya kasus Gubernur Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017. Kelemahan kepemimpinan Jokowi tampak dari dua fakta yang terjadi sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini, yakni kinerja menteri-menteri kabinet yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kurang (bahkan) tidak independennya Presiden Jokowi dari tekanan partai-partai politik yang mendukungnya. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang lemah ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), sebanyak 51,3 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.<sup>2</sup> Sebanyak 78,9 persen publik tidak puas dengan penanganan bencana asap yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.<sup>3</sup>

Aksi Bela Islam yang menandai bangkitnya kelompok-kelompok radikal keagamaan, bukan hanya telah mendorong partisipasi umat Islam secara umum, namun juga yang disesali adalah adanya mobilisasi terhadap kalangan generasi muda, terutama para pelajar di beberapa daerah sekitar ibukota. Mobilisasi yang mengatasnamakan keprihatinan terhadap kasus penistaan agama ini telah menjadikan isu agama sebagai komoditi politik dan menjadi faktor penentu dalam proses politik yang terjadi di Indonesia, yakni proses Pilkada DKI Jakarta yang fenomenal dan krusial tersebut.

Dengan dalih membela agama, siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi misalnya, berbondong-bondong berangkat ke Ibukota pada Aksi 212. Pengerahaan massa tersebut ada yang secara terang-terangan dikoordinir oleh guru sekolah dalam jumlah yang cukup banyak, puluhan hingga ratusan orang. Ada pula siswa-siswi yang berangkat dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar belasan orang, namun tetap difasilitasi dan

---

2 Kabar Pergerakan.com. Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

3 Pernyataan Rendy Kurnia (Peneliti Utama LSI), di Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2016 dalam Kabar Pergerakan.com. Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

didampingi oleh guru dari sekolah bersangkutan. Sebagian orang tua siswa-siswi tersebut tak kalah tersulut karena ikut mendampingi langsung putra-putrinya ke Jakarta.

Para pelajar yang berada jauh dari Jakarta pun tak ketinggalan melakukan aksi serupa. Jarak yang terlampau jauh dengan, dan biaya yang terlalu tinggi menuju, Ibukota tak bisa membendung hasrat mereka untuk berunjuk rasa. Bersama dengan kelompok-kelompok lain, para pelajar tersebut mengikuti dan melakukan aksi di titik-titik krusial di daerah tempat tinggalnya. Misalnya, pelajar-pelajar di Kota Padang dan Kota Yogyakarta dengan bangganya menggunggah aksi mereka, baik 411 maupun 212, di media sosial seperti instragram dan twitter.

Sebagai bangsa yang majemuk (*plurality*) kita harus mampu mengembangkan perbedaan dalam keragaman tetapi mendukung prinsip pluralisme sekaligus multikulturalisme. *Agree in the diversity* merupakan prinsip berbangsa dalam negara yang multikultur (pluralistik) seperti Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh belajar ke Canada, United Kingdom, Swedia, Norwegia maupun Swiss kalau hanya sekedar ingin melihat keragaman. Hal yang bisa diambil sebagai pelajaran dari negara-negara lain adalah bagaimana mereka mengelola keragaman dalam kondisi dan situasi keadilan. Kondisi keadilan hukum, ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keragaman akan memberikan kekuatan yang memadai di Indonesia untuk terus berlangsung. Oleh sebab itu, kita harus saling memiliki sikap percaya pada semua elemen masyarakat untuk mendorong harmoni sosial.

Salah satu model bagaimana mengelola keragaman yang pernah dilakukan di negeri ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Ambon yang mampu hidup berdampingan dalam keragaman budaya dan agama. Bagaimana masyarakat Jawa mampu menghargai kehadiran orang yang bukan Jawa, bukan satu agama, bahkan tidak satu aliran (mazhab) tetapi bisa berdampingan dalam masyarakat. Demikian pula yang dilakukan masyarakat Ambon, yang mampu hidup berdampingan dengan masyarakat tidak satu agama dan satu etnis. Saat ini yang perlu dilakukan sebenarnya bagaimana agar kehidupan harmonis masyarakat Jawa dan Ambon seperti

sebelum reformasi politik terus terjaga, bukan harmoni dalam kepura-puraan. Namun dalam perkembangan selanjutnya sesuai reformasi tahun 1999, Ambon dan beberapa provinsi lain di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis, intoleransi menguat.

Intoleransi turut menggejala di kalangan kaum muda Indonesia, seperti diperlihatkan oleh berbagai sumber. Misalnya, survei The Wahid Foundation (2017) mengungkapkan bahwa terdapat 11 juta kaum muda Indonesia yang berpotensi menjadi radikal adalah bagian yang cukup penting diperhatikan dalam perkembangan keagamaan di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Kajian Islam dan Pendidikan tahun 2014 telah merilis bahwa terdapat 34 % kaum muda dikalangan siswa SMA setuju dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah untuk berjihad dengan kekerasan. Sedangkan riset dari Navara Institut menjadikan sasaran kaum profesional muslim Indonesia sebagai sampling dari survei yang dilakukan. Navara mendapatkan data bahwa tidak kurang dari 55% kaum profesional itu setuju dengan gerakan radikal. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menyatakan bahwa ada potensi radikalisme yang cukup kuat dikalangan kaum muda muslim Indonesia, melalui survei bertajuk “Api dalam Sekam”.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu didisain (*social engineering*) agar tetap memiliki daya tahan (*recilience*) untuk menghargai, menghormati serta melangsungkan kehidupan harmoni sosial agar tidak hidup dalam kepura-puraan. Hal ini penting karena seringkali harmoni dalam kepura-puraan akan menciptakan persoalan yang jauh lebih serius daripada sebelumnya jika tidak dikelola dan dipersiapkan terlebih dahulu. Disinilah tugas para pendidik, ustaz, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan para pemuda menjadi pilar untuk membangun mentalitas keragaman dalam negara demokrasi. Sebagai negara yang memiliki kekuatan masyarakat sipil, Indonesia sebenarnya dapat berharap pada masyarakat sipil semacam Muhammadiyah dan NU untuk mendukung berlangsungnya kehidupan keagamaan, sosial dan politik yang stabil. Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan utama Civil Islam sangat diharapkan mampu menjadi kekuatan utama untuk mengembangkan

masyarakat Islam yang toleran, beradab dan demokratis untuk masa depan Indonesia.

### **Sekolah Menengah sebagai Arena Radikalisme**

Indonesia telah dibangun oleh para pendiri bangsa di atas fondasi kebinekaan. Sejauh ini, demokrasi adalah sistem terbaik dalam mengelola bangsa dan negara, yang memungkinkan kebinekaan dapat dirawat dengan baik. Semua golongan yang menjadi penghuni Nusantara ini dapat berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi dalam sistem yang demokratis. Namun demikian, setidaknya dalam 15 tahun terakhir, kita dihadapkan pada ancaman kelompok-kelompok intoleran, sektarian dan radikal yang telah merongrong kehidupan demokrasi kita dewasa ini. Cara pandang yang radikal, sektarian, dan intoleran tersebut merupakan parasit yang menggerogoti proses demokratisasi.

Bahkan, pada batas dan kasus tertentu, cara pandang yang radikal tersebut berujung pada aksi ekstremisme berupa terorisme yang mengoyak kemanusiaan. Jika menilik pada kasus peledakan bom di Mesjid Adz-Dzikra Mapolresta Cirebon tahun 2011 lalu, dari berbagai laporan diketahui bahwa pelaku (MS) berpandangan radikal. Selain ayahnya sendiri yang ia kafirkan (*takfiri*), rekam jejak menunjukkan bahwa pelaku dikenal sebagai seorang yang radikal dan militan dalam merealisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Aksi brutal anti-Ahmadiyah yang pelaku perlihatkan menjadi salah satu contohnya.

Dalam perjalanannya, cara pandang radikal dan monolitik yang dimotori oleh kelompok radikal ini didiseminasi dan diinternalisasikan melalui berbagai model dan cara yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi dan politik di Indonesia yang sedang berubah (transisi). Di antaranya mereka menginfiltrasi bahkan mengambil alih beberapa institusi milik organisasi masyarakat islam seperti sekolah dan mesjid.<sup>4</sup>

Pada proses selanjutnya, kelompok radikal ini memengaruhi bahkan berhasil menguasai beberapa institusi pendidikan umum negeri setingkat

---

4. Abdurrahman Wahid, dkk. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009).

SMA. Akibat pengaruh gerakan radikal ini, muncul gejala sekolah-sekolah menengah atas negeri menjadi pusat penyemaian intoleransi, eksklusifitas, anti-kebinekaan, bahkan kekerasan dalam berbagai bentuknya (Farha Ciciek: 2008; MAARIF Institute: 2011). Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, dari 500 guru agama dan 200 siswa SMA berkesimpulan, pola keberagamaan intoleran di tengah masyarakat memiliki basis kuat di sekolah-sekolah umum, terutama di Jawa (PPIM: 2008).

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan kesetujuannya terhadap aksi radikal. Hasil survei dari Wahid Foundation (2017) menunjukkan sebanyak 60 persen aktivis Rohis, dari 1.626 responden, bersedia berjihad ke wilayah konflik seperti Poso dan Suriah, 10 persen mendukung Serangan Bom Sarinah, dan 6 persen mendukung ISIS.

Kasus bom panci di Bandung yang terjadi pada 2017 juga melibatkan anak muda. Pemuda berinisial AW yang tengah berjualan ketika bom itu meledak di kontrakkannya, masih berumur 22 tahun. Dari keterangan yang beredar, terduga diketahui menyelesaikan pendidikan menengahnya di sebuah madrasah aliyah. Menarik untuk dilihat apakah radikalisasi juga terjadi di madrasah aliyah? Karena sejauh ini penelitian banyak dilakukan di sekolah menengah atas negeri. Meskipun dalam kasus ini AW sudah keluar beberapa tahun lamanya.

Diluar madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat 3 hal yang menyebabkan proses radikalisasi di sekolah-sekolah menengah atas negeri itu terjadi. *Pertama*, indoktrinasi yang dilakukan oleh guru ketika proses belajar mengajar. Seperti yang dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran Sosiologi di sebuah sekolah di Solo (Farha Ciciek: 2008). Penelitian MAARIF Institute seolah mengkonfirmasi temuan Ciciek, ketika menemukan proses serupa yang dilakukan oleh seorang Guru Mata Pelajaran Bahasa Asing (Jerman) di sebuah sekolah di Cianjur (2011) dan seorang Guru Mata Pelajaran Fisika di Surakarta (2017). Hal yang patut untuk dicatat, temuan PPIM UIN Jakarta (2016) yang menunjukkan pola hubungan antar

umat beragama di kalangan Guru PAI bersifat koeksistensi dan normatif, yang pada batas tertentu, kian menguatkan proses radikalisasi di sekolah.

*Kedua*, infiltrasi pandangan keislaman ekstrem yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di mana Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjadi jalur penting dalam proses regenerasi kelompok-kelompok radikal di sekolah-sekolah, utamanya melalui bidang kerohanian islam (rohis) sebagai pintu masuknya. Pelatihan semi-militer "Jundullah" di Cianjur, yang menjurus pada praktik kekerasan atas nama agama (Farha Ciciek: 2008), dan mentoring-mentoring melalui *liqa* di Yogyakarta (MAARIF Institute 2011) dan Sukabumi (MAARIF Institute 2017) melalui modul yang muatannya mengandung nilai-nilai anti-Pancasila dan anti-kebinekaan, merupakan dua contoh penetrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Interaksi dengan alumni ini turut berdampak pada buku bacaan (literatur) keislaman yang dikonsumsi oleh para siswa. Di sebuah sekolah di Sukabumi dan Makassar, ditemukan bahwa siswa yang tergabung dalam rohis cenderung membaca buku-buku yang kerap dikategorikan berhaluan "kanan". Misalnya, buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb dan Hasan al-Bana, salah dua tokoh Ikhwanul Muslimin. Bahkan di satu sekolah di Sukabumi, sebelum HTI dilarang melalui Perppu No. 2 Tahun 2017, buletin-buletin Jumatnya berserakan di Sekretariat Rohis (MAARIF Institute: 2017).

Literatur keislaman ini berperan sangat signifikan dalam penyemaian ideologi islamis di kalangan pelajar. Hasil penelitian yang digagas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) memperlihatkan ada empat kategori literatur keislaman di kalangan siswa. Jika digambarkan dalam sebuah piramida, dari yang paling banyak dibaca sampai yang paling sedikit, literatur yang digandrungi secara berurutan adalah *Islamisme Populer, Tarbawi, Salafi, Tahriri*, dan *Jihadi*. Gambaran literatur tersebut tidak mengherankan karena alumni-alumni banyak yang terafiliasi kepada gerakan trans-nasional seperti HTI dan Tarbiyah. Dan beberapa di antara mereka juga terafiliasi kepada Wahabi.

*Ketiga*, lemahnya implementasi dan artikulasi terkait kebijakan yang menguatkan kebinekaan. Hal ini bisa disorot pada tiga level. Level Pertama, Kebijakan Internal Sekolah yang di dalamnya bukan hanya tidak memiliki muatan penguatan kebinekaan dan berupaya secara sensitif menghadang radikalisme di sekolah, namun keberadaaan kebijakan internal ini malah berjalan sebaliknya, yakni turut menyuburkan proses radikalisme yang ada di sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah seringkali melakukan blunder dengan mengundang kelompok-kelompok radikal untuk menjadi narasumber pengajian bulanan di sekolah. Alih-alih memperkuat kebinekaan, seringkali mereka datang dengan materi pengajian yang secara ideologis bermuatan radikal, eksklusif, sektarian, anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan menolak NKRI karena dianggap sebagai negara thogut/kafir (MAARIF Institute: 2017). Di samping itu, karena ketidaktahuannya tentang peta gerakan kelompok radikal, sekolah seringkali membuka pintu lebar-lebar untuk kelompok radikal menjadi pembimbing keagamaan di sekolah. Baik ketika sekolah memintanya secara langsung, maupun ketika kelompok radikal menawarkan diri. Dalih utama yang dikemukakan ialah sekolah untuk penguatan keagamaan, lebih baik siswa menjadi terdidik dan memiliki akhlak mulia sebagai perwujudan dari pendidikan karakter daripada terjebak dengan masalah-masalah yang kerap menjangkiti generasi muda seperti tawuran, pergaulan bebas, dan genk motor.

Level Kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah yang cenderung diskriminatif dan anti kebinekaan. Di era otonomi daerah ini, institusi sekolah menengah atas berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi dan Kantor Wilayah Kemenag. Ada banyak daerah telah menerapkan regulasi daerah dalam bentuk perda-perda syariah. Dalam kenyataannya perda-perda syariah ini telah mendorong para pemangku kebijakan sekolah merumuskan regulasi sekolah yang diskriminatif. Sebagai contoh, di Pandeglang dan Banyuwangi telah menerapkan kebijakan diskriminatif dengan mewajibkan seluruh siswa (baik muslim maupun non-muslim) untuk memakai jilbab.

Level Ketiga, Kebijakan Pemerintah Pusat. Penelitian MAARIF Institute (2017) menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait dengan

penguatan kebinekaan dan inklusifitas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti) tidak dapat diimplementasikan dan diartikulasikan secara maksimal di tingkat sekolah. Padahal kebijakan yang ada jika diimplementasikan dan diartikulasikan dengan baik akan membentengi para siswa dari pandangan yang radikal.

Sekalipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi, tapi semangat otonomi daerah pada praktiknya sangat memengaruhi cara pandang dunia pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu, juga karena peraturan yang dibuat sulit dipahami dan tidak implementatif.

Upaya membendung arus radikalisme di sekolah menengah atas dan madrasah aliyah dapat dilakukan dengan upaya memperkuat kebijakan yang mempromosikan pandangan-pandangan yang inklusif dan pro-kebinekaan di level sekolah, dinas pendidikan propinsi, kantor wilayah kemenag tingkat propinsi, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama. Selain itu, perlu juga dimaksimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas jalannya kebijakan tersebut.

Dalam studi ini, kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud adalah OSIS. Baik langsung maupun tidak, regulasi tentang OSIS telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi terkait pendidikan secara umum. Regulasi ini dikeluarkan sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi-regulasi yang dimaksud di antaranya berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.

Di tingkat Pusat, ada dua regulasi yang terkait dengan OSIS. Yakni, *Pertama*, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Permendiknas ini menjadi regulasi awal pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) yang berupaya menjadi pedoman dalam pengelolaan pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) di sekolah.



*Kedua*, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud ini berupaya melengkapi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Karena didalamnya disebutkan mengenai tujuan, pengguna, definisi operasional, komponen kegiatan ekstrakurikuler, mekanisme kegiatan ekstrakurikuler, dan pihak yang terlibat. Dari sini terlihat upaya pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya, utamanya pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar.

Diluar kedua regulasi tersebut, Pemerintah Pusat membuat turunan regulasi terkait OSIS melalui "Buku Panduan OSIS terbitan Kemdiknas Tahun 2011". Selain kedua regulasi dan turunannya tersebut, terdapat dua regulasi lain yang acapkali dikaitkan dengan OSIS.

*Pertama*, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Jika dilihat secara seksama, pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti di sekolah, baik kegiatan yang diwajibkan maupun contoh-contoh pembiasaan baik, sebagian mengulang materi (jenis kegiatan) kegiatan ekstrakurikuler yang disebutkan dalam regulasi sebelumnya. Yang menjadi kebaruan dari Permendikbud ini adalah menekankan ulang kembali nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan yang dirasa pudar dan pengembangan interaksi peserta didik dengan orang tua dan masyarakat. *Kedua*, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dengan uraian yang dikemukakan diseluruh tulisan pendahuluan ini, setelah adanya Aksi Bela Islam I dan II, kita dapat memerhatikan bahwa gerakan radikal di Indonesia jika mempergunakan istilah Populisme Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Vedi Hadiz, semakin jelas didepan mata. Gerakan mobilisasi massa dengan sentimen keagamaan dan etnis menjadi badian dari politik populisme yang sangat sering dipergunakan di media sosial. Bahkan media sosial sekarang ini bisa dikatakan sebagai corong utama kampanye gerakan Populisme Islam (radikalisme Islam) yang terus berkembang menjelang Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Demikian pula dikalangan anak-anak siswa menengah keatas,

akan mengalami pengerasan jika tidak ada resistensi dan daya tahan dari mereka untuk menyebarkan paham-paham keagamaan yang bersifat moderat. Oleh sebab itu, salah satu kajian dalam buku ini hendak menunjukkan adanya daya tahan ditingkat lokal dan sekolah sebagai upaya atau mekanisme menangkal adanya penetrasi radikalisme dan ekstremisme yang banyak menyerang sekolah.

Untuk mengetahui kondisi terkini di kalangan anak-anak sekolah menengah atas dan madrasah aliyah, maka dilakukan kajian terhadap OSIS sebagai organisasi resmi di sekolah untuk menjadi benteng atas hadirnya radikalisme di sekolah. Untuk mendalami hal tersebut, MAARIF Institute selama 20 hari pada 2-21 Oktober 2017 lalu melakukan penelitian terkait kebijakan OSIS di enam kota, lima propinsi di Indonesia. Kota-kota yang menjadi sampel penelitian adalah Kota Padang (Sumatera Barat), Kab. Cirebon dan Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), serta Kota Tomohon (Sulawesi Utara).

Keenam kota tersebut dipilih berdasarkan konteksnya masing-masing. Dari mulai daerah yang menjadi basis gerakan islamis, hingga upaya untuk melihat dan memahami kecenderungan ekstremisme terhadap minoritas Muslim dalam konteks masyarakat non-Islam dan implikasinya di sekolah. Rangkaian penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dari Oktober sampai dengan Desember 2017.

Kajian dan penelitian yang dilakukan dalam buku ini merupakan bagian dari proyek *Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent and Extremism in Indonesia (CONVEY)*. Dalam hal ini, MAARIF Institute bermitra dengan *Project Management Unit (PMU)*—Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta & *United Nations Development Programme (UNDP)* Indonesia.

Terdapat beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam kajian sebagaimana tertuang dalam buku ini, yakni bagaimana peran OSIS yang diharapkan menjadi penjaga kebinekaan dan kehidupan inklusif di sekolah? Terutama dalam kaitannya dengan kebijakan internal sekolah yang kerap membatasi gerakannya? Bagaimana pula kondisi sekolah kini? Apakah ada

pintu-pintu radikalisme lain yang masuk ke sekolah? Juga, upaya apa yang ditempuh sekolah dan OSIS dalam membendung arus radikalisme yang masuk ke sekolah-sekolah?

*Bagian Satu*

RADIKALISME  
DALAM  
GERAKAN